

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	RAKYAT MERDEKA	13	30-8-2002

Soeharto Terlibat Kasus TAC Pertamina? Ginandjar Tunjuk Hidung



Ginandjar Kartasmita

Tak mau semua kesalahan hanya ditimpakan kepadanya, kemarin bekas Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasmita mulai berani tunjuk hidung. Dia mengungkapkan keterlibatan dan peran bekas Presiden Soeharto dalam kontrak kerjasama Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dan PT Ustraindo Petro Gas (UPG).

GINANDJAR menyatakan, sebenarnya Soeharto lah yang memutuskan sekaligus memberikan disposisi tentang kontrak kerjasama TAC. Bahkan, lanjutnya, Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) sejak awal sudah mengetahui kontrak TAC karena diberi tahu oleh Soeharto.

"Persetujuannya adalah Pertamina dan sebagai mentamben saya hanya mendapat disposisi dari presiden dan bukan yang memutuskan," katanya di Jakarta, kemarin. Selain meluruskan

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

adanya sementara pemberitaan dari media massa yang menyebutkan tidak adanya persetujuan DKPP dalam kasus proyek TAC, Ginandjar juga sempat mempersoalkan keterangan bekas Mensesneg Moerdiono ketika diperiksa tim jaksa penyidik di Kejaksaan Agung menyangkut dirinya dan peran DKPP dalam kasus TAC.

"Saya mengecek kepada Pak Moerdiono apakah beliau mengungkapkan hal itu, ternyata jawabannya tidak," kata Ginandjar. Menurut dia, Moerdiono mengatakan semua pernyataannya itu terekam dalam berita acara pemeriksaan (BAP). "Makanya, saya kaget kok Kapuspenkum Kejaksaan Agung menginformasikan hal lain," katanya.

"Saya bukan membela diri tentang peran DKPP ini. Tetapi ada hal-hal yang tidak dipahami mengenai implementasi UU No 8 Tahun 1971 tentang Pertamina," tambahnya.

Dikatakan bahwa ketentuan Pasal 17 UU No 8 Tahun 1971 soal DKPP yang beranggotakan menteri keuangan, menteri sekretaris negara, menteri negara PPN/Ketua Bappenas, serta Menristek menyangkut masalah kebijakan sepihak adalah tidak benar.

Menurut Ginandjar, dalam pasal tersebut rapat DKPP hanya dapat diselenggarakan satu kali dalam setahun. "Itu pun untuk membahas laporan tahunan direksi," katanya.

Kemarin, bekas Dirut PT Ustraindo Petro Gas (UPG) HR Praptono H Tjitrohupojo yang berstatus tersangka dalam kasus korupsi TAC

kembali diperiksa di Kejaksaan Agung. Kedatangannya hanya untuk memberikan kesaksian tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan Ginandjar Kartasasmita.

Dalam pemeriksaan yang dipimpin oleh tim koneksitas Suwandi, berlangsung di ruangan pidana khusus (Pidarus) dimulai pukul 10.00 WIB. Kepada wartawan, Praptono mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan seputar hubungannya dengan Ginandjar. "Tim penyidik menanyakan kepada saya asal perkenalan dengan Ginandjar. Saya menyatakan kenal dengan Ginandjar karena kedinasan, dia seorang menteri, sedang saya sebagai pengusaha," jelasnya.

Soal perubahan kerjasama TAC, lanjutnya, amandemen perjanjian kerjasama antara Pertamina dengan UPG dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi atas cara pengelolaan ladang minyak saat diserahkan kepada UPG. "Terhadap perbedaan persepsi ini, kuasa hukum UPG telah mengajukan keberatan kepada Dirjen Minyak dan Gas Bumi yang kemudian ditindaklanjuti dengan tim independen," paparnya.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama lima jam itu, Praptono mengungkapkan keheranannya. Di depan pemeriksa, Praptono mengaku rugi atas kerjasamanya TAC dengan Pertamina.

"Justru uang saya jadi habis-habisan. Saya tidak melakukan hal yang merugikan negara," tukasnya. (MAF/TSA/IP)

